



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

PENGUMUMAN

NOMOR : 6/CPNS/Polhukam/12/2018

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B1010/XII/18.01 tanggal 24 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018, bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi.
2. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
3. **Peserta yang memiliki Keterangan "L" pada kolom Keterangan sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/B1010/XII/18.01 (lampiran I).**

Adapun penjelasan dalam Lampiran I adalah :

a. Jenis Tes :

1. SKB 1 : *Computer Assisted Test* (CAT)
2. SKB 2 : Psikotes
3. SKB 3 : Wawancara

b. Keterangan :

1. P1 : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018
2. P2 : Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018
3. L : Lulus seleksi CPNS
4. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
5. TH : Tidak hadir

Bagi pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi akhir wajib melakukan pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Melengkapi dan membawa dokumen persyaratan sebagaimana yang tercantum di bawah ini pada :

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Kamis / 8 s.d. 10 Januari 2019

Waktu : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Bagian Kepegawaian Gedung B Lantai 6 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat.

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBERKASAN :

- a. Surat lamaran yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas Materai Rp.6.000 ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir yang dilamar (dilampirkan fotocopy ijazah SD, SMP, SMA rangkap 3).
 - SD Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**;
 - SMP Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**;
 - SLTA/Sederajat Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**;
 - Diploma III (D III) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Direktur Program/Dekan/Ketua**;
 - Sarjana (S1) Perguruan tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Rektor/Dekan/Pembantu Dekan I Bidang Akademik/Ketua/Wakil Ketua I Bidang Akademik**.
- c. Daftar Riwayat Hidup (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta hitam/ballpoint bermaterai Rp. 6.000,- dan ditempel pasfoto 3x4 berlatar belakang warna merah rangkap 3).
- d. Surat Pernyataan 5 Point (terlampir, diketik dan diberi materai Rp. 6.000,- serta ditandatangani bertinta hitam, rangkap 3).
- e. Kartu Pencari Kerja (kartu kuning) dari Dinas Ketenagakerjaan setempat yang masih berlaku sampai dengan Januari 2019. (asli dan 2 fotocopy legalisir).
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polri (Polres) yang masih berlaku sampai dengan Januari 2019 sebagai persyaratan pengangkatan CPNS (asli dan 2 fotocopy dilegalisir).
- g. Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru (Bulan Januari 2019) dan harus ditandatangani oleh Dokter (asli dan 2 fotocopy).
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya (NAPPZA) dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru ditandatangani oleh Dokter serta melampirkan hasil laboratorium (Bulan Januari 2019, asli dan 2 fotocopy).
- i. Pasfoto 3x4 berlatar belakang merah (10 lembar) dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik foto tersebut.
- j. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/KTP Elektronik/Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman KTP-el dari Dukcapil (3 lembar fotocopy).
- k. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang telah berkeluarga).
- l. Berkas kelengkapan dokumen rangkap 3 (tiga) dimasukkan ke dalam Stopmap :
 - Warna hijau untuk kualifikasi pendidikan Sarjana (S1)
 - Warna kuning untuk kualifikasi pendidikan Diploma III (D III)diluar Stopmap tertulis:
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Jabatan yang dilamar
 - Pendidikan
 - Alamat Sekarang
 - Nomor Telepon/HP yang mudah dihubungi
 - Alamat email

II. Lain-lain

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dalam jangka waktu tanggal dimaksud peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Pelayanan dan penjelasan terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPNS Kemenko Polhukam Tahun 2018 dapat menghubungi (021) 34833702 (pada hari kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB).
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian mohon menjadi perhatian.

Jakarta, 27 Desember 2018

a.n. Ketua Panitia Seleksi CPNS
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,
Sekretaris,



Janiruddin, S.H., M.Si